

Presentasi Kode Etik Psikologi

Makna Kode Etik bagi Organisasi Profesi

DOSEN : FEBI HERDAJANI, S.Psi., M.Si., Psi



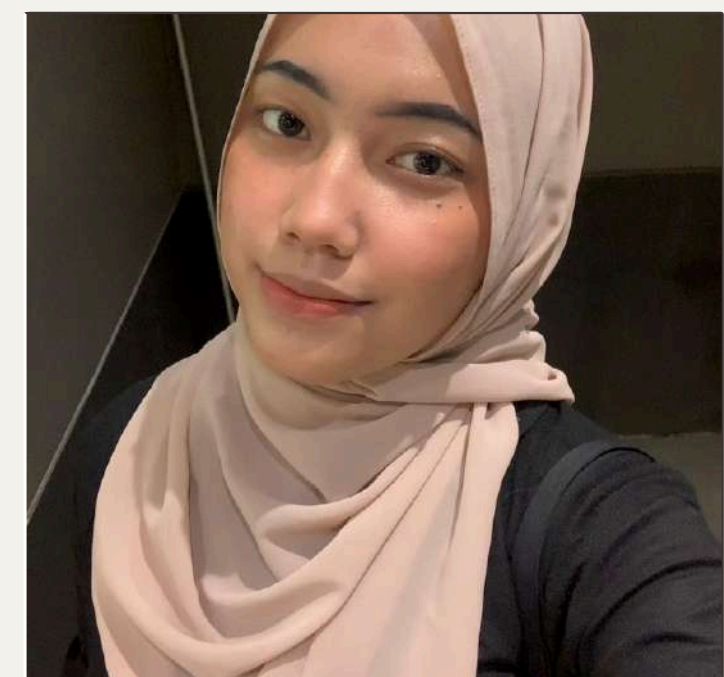
KELOMPOK 8



Muhammad Ravanza Kindy
2524090089



Syahda Qonita Az-Zalwi
2524090090



Siti Mubaroka
2524090091



Pentingnya kode etik

kode etik memiliki kedudukan penting dalam suatu profesi karena menjadi bagian dari upaya mengarahkan perilaku profesional agar sesuai dengan:

- ✓ Nilai
- ✓ Tanggung jawab moral
- ✓ Norma
- ✓ kepentingan pengguna layanan

Kode etik ini disusun berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dan berfungsi sebagai standar pengaturan diri (self regulation) bagi psikolog dan ilmuwan psikologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (HIMPSI, 2010).

Pengertian Kode Etik

→ Secara etimologis, istilah "kode etik" merupakan gabungan dua kata, yaitu "kode" yang berarti tanda atau kumpulan aturan yang disepakati bersama, dan "etik" yang berasal dari bahasa Yunani ethos, berarti watak, adab, atau cara hidup.

→ Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kode etik sebagai norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.

→ Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dalam Kode Etik Psikologi Indonesia Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa Kode Etik Psikologi merupakan seperangkat nilai yang wajib ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh psikolog maupun ilmuwan psikologi dalam menjalankan kegiatannya di Indonesia (HIMPSI, 2010).

→ Kode etik dirumuskan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan tujuan menjamin kesejahteraan umat manusia sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna layanan psikologi maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan layanan atau menjadi objek studi psikolog

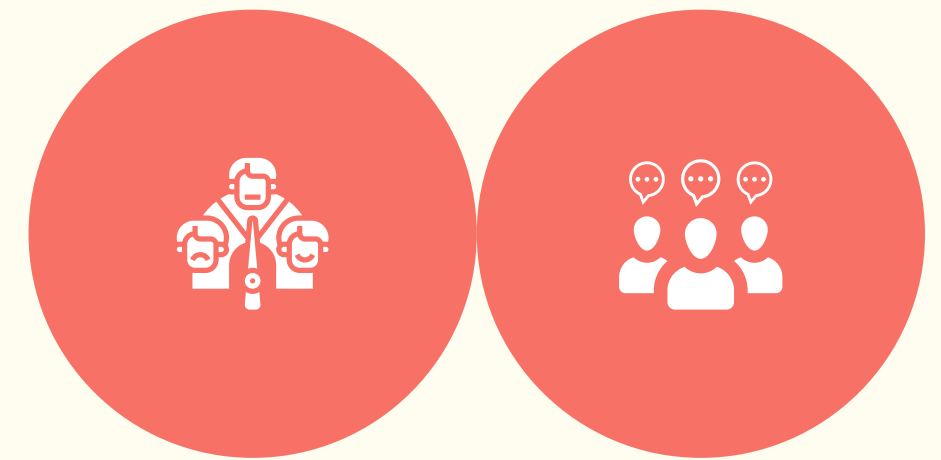
Pengertian Organisasi Profesi



- Organisasi profesi merupakan wadah yang menghimpun individu yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan menjalankan kegiatan profesional berdasarkan kompetensi serta ketentuan yang berlaku.
- Kedudukan organisasi profesi psikologi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.
- Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) merupakan organisasi profesi independen yang menjadi wadah berhimpunnya Psikolog dan Ilmuwan Psikologi di Indonesia serta berpegang teguh pada Kode Etik Psikologi Indonesia.



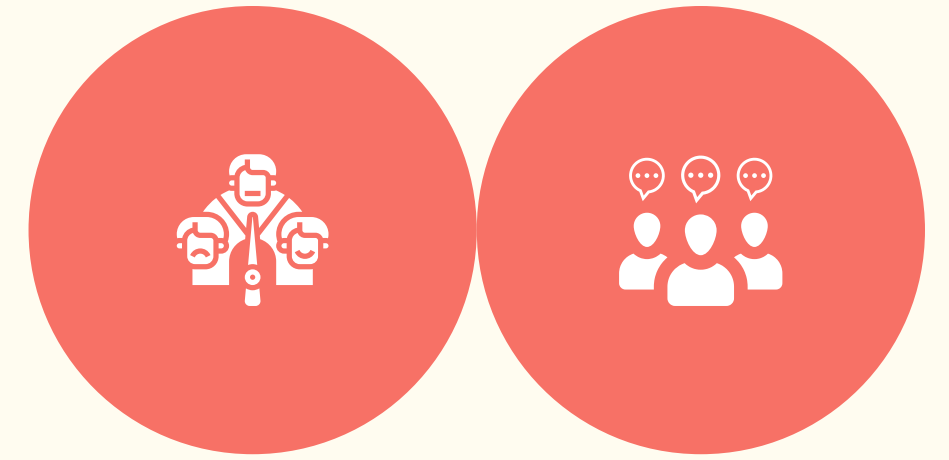
Kode etik sebagai identitas profesi



Membentuk nilai dan karakter profesi. Kode etik berperan penting dalam membentuk identitas moral organisasi profesi, termasuk profesi psikologi. Pada saat suatu profesi baru berdiri atau sedang memperkuat eksistensinya, kode etik menjadi fondasi nilai yang menentukan arah moral profesi tersebut. Bertens (1993) menyatakan bahwa etika profesi merupakan kristalisasi nilai-nilai moral yang disepakati bersama oleh anggota profesi dan dijadikan standar untuk menilai tindakan profesional. dengan demikian, kode etik bukan sekadar aturan dari luar, melainkan cerminan komitmen internal profesi terhadap integritas. Bagi HIMPSI, Kode Etik Psikologi Indonesia (2010) berfungsi sebagai instrumen untuk membentuk dan menilai karakter profesi psikologi. Seiring perubahan sosial dan teknologi, kode etik juga menjadi alat evaluasi untuk meninjau kesesuaian praktik anggota dengan nilai dasar profesi dari waktu ke waktu.

Menunjukkan moral tanggung jawab psikolog. Kode etik menunjukkan tanggung jawab moral psikolog terhadap klien, masyarakat, dan profesi. Magnis Suseno (2000) menegaskan bahwa profesi bukan sekadar sarana mencari nafkah, melainkan institusi sosial yang berfungsi penting bagi masyarakat, sehingga anggotanya wajib mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Dalam Kode Etik Psikologi Indonesia, tanggung jawab ini tampak pada kewajiban memberikan layanan yang kompeten, menjaga kerahasiaan, menghindari diskriminasi, bertindak demi kesejahteraan klien, serta mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan melalui pengikutan perkembangan ilmu dan pendidikan berkelanjutan. Psikolog juga bertanggung jawab atas reputasi profesi, karena tindakan tidak etis seorang anggota dapat merusak kepercayaan publik terhadap seluruh profesi. Dengan demikian, tanggung jawab moral psikolog bersifat multidimensi: terhadap klien, masyarakat, profesi, dan diri sendiri.

Kode Etik sebagai Standar Perilaku Anggota

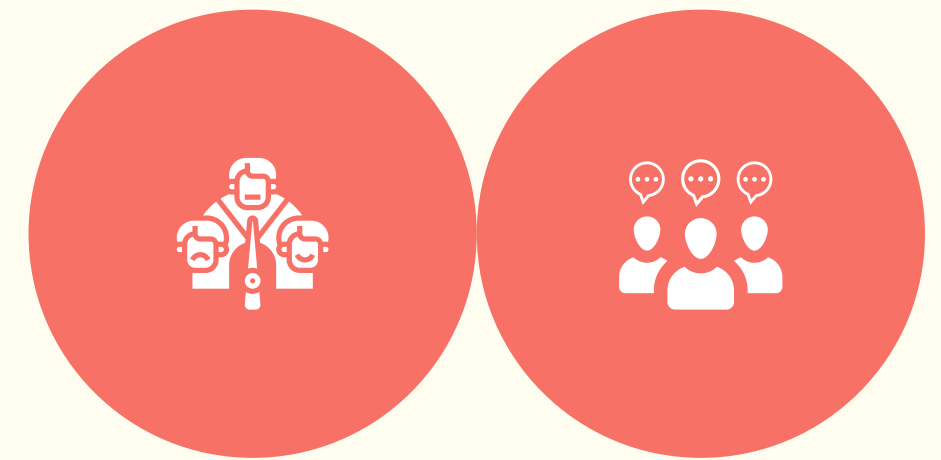


Pedoman perilaku profesional. Salah satu fungsi utama kode etik adalah menjadi standar perilaku yang mengikat seluruh anggota organisasi profesi. Kode Etik Psikologi Indonesia (HIMPSI, 2010) menyatakan bahwa kode etik merupakan seperangkat nilai yang wajib ditaati dan dijalankan sebaik-baiknya oleh psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia. Sebagai pedoman, kode etik memberikan arahan konkret mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, misalnya kewajiban menjaga kerahasiaan data klien, larangan mengeksploitasi hubungan profesional demi keuntungan pribadi, kewajiban bekerja sesuai batas kompetensi, serta larangan diskriminasi berdasarkan suku, agama, gender, atau status sosial, sehingga praktik berjalan terstandar dan bertanggung jawab. Menurut Bertens (1993), etika profesi melibatkan kewajiban moral yang mengikat, dan kepatuhan terhadap kewajiban itu merupakan indikator integritas profesi.

Pengambilan keputusan pada dilema etik. Kode etik juga berfungsi sebagai kerangka pengambilan keputusan ketika terjadi dilema etik. Psikolog kerap menghadapi situasi kompleks, misalnya konflik antara menjaga kerahasiaan klien dan kewajiban melaporkan bahaya terhadap pihak ketiga, atau tekanan institusi untuk memberikan rekomendasi yang tidak objektif.

(Corey, 1991) menekankan pentingnya kesadaran etis (ethical awareness), yaitu kemampuan mengenali situasi yang berpotensi melanggar etika dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan kode etik, disertai refleksi moral pribadi dan komitmen terhadap nilai kemanusiaan. Prosesnya meliputi identifikasi masalah etis, pengumpulan informasi relevan, perujukan pada kode etik, pertimbangan konsekuensi berbagai pilihan, dan pengambilan keputusan yang paling sesuai dengan prinsip moral. Dengan demikian, kode etik berperan sebagai kompas moral yang membekali psikolog dengan kerangka berpikir, bukan sekadar memberi jawaban pasti.

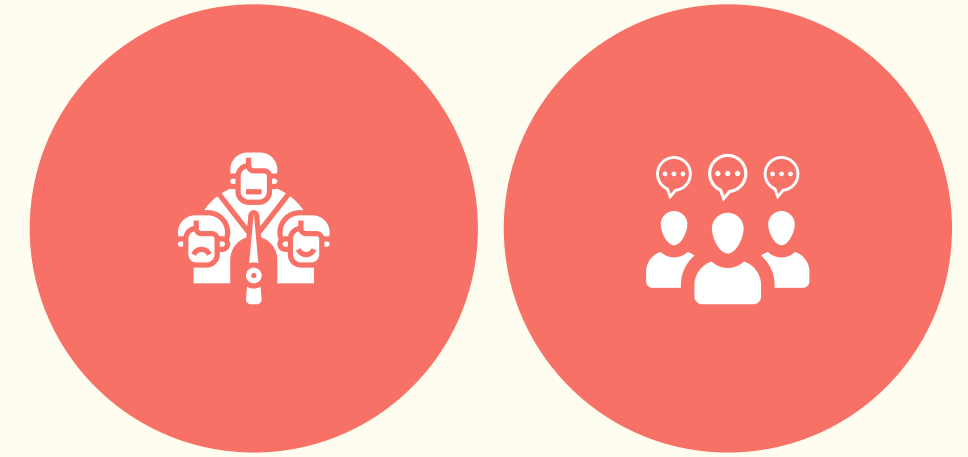
Kode Etik sebagai Perlindungan Masyarakat



Melindungi klien dan pengguna layanan. Kode etik berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat, khususnya klien atau pengguna layanan psikologi. Kode Etik Psikologi Indonesia (HIMPSI, 2010) tidak hanya mengatur internal profesi, tetapi juga menjamin layanan diberikan secara aman, bermartabat, dan menghormati hak klien. Adapun perlindungan pada ketentuan kerahasiaan: Pertama, psikolog wajib menjaga kerahasiaan informasi klien, kecuali dalam situasi yang mengancam keselamatan diri atau orang lain. Ketentuan ini mencerminkan penghormatan terhadap privasi dan otonomi klien, serta membangun kepercayaan yang menjadi dasar efektivitas layanan. Kedua, psikolog hanya boleh memberikan layanan sesuai bidang keahlian dan pelatihannya agar praktik yang tidak kompeten dapat dicegah. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab moral profesi untuk memberikan layanan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mencegah penyalahgunaan kewenangan. Kode etik juga mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh psikolog. Corey (1991) mengingatkan bahaya hubungan ganda (dual relationships), yaitu ketika psikolog memiliki lebih dari satu peran terhadap klien, misalnya sebagai terapis sekaligus mitra bisnis atau pasangan romantis, yang dapat mengaburkan batas profesional dan membuka ruang eksploitasi. Karena itu, Kode Etik Psikologi Indonesia melarang pemanfaatan hubungan profesional untuk keuntungan pribadi, seksual, atau finansial. Penyalahgunaan dapat pula berupa rekomendasi yang tidak objektif, manipulasi hasil tes psikologi, atau pemaksaan nilai pribadi kepada klien, sehingga psikolog wajib bertindak objektif, jujur, dan menghormati otonomi klien (HIMPSI, 2010). Magnis Suseno (2000) menambahkan bahwa profesi bertanggung jawab secara sosial untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau institusi, oleh karena itu-kode etik menjadi mekanisme pengendalian agar tanggung jawab tersebut dijalankan.

Kode Etik sebagai Mekanisme Pengawasan dan Disiplin



Kode etik profesi merupakan seperangkat norma yang disepakati oleh suatu kelompok profesi untuk mengatur tindakan dan tanggung jawab anggotanya. Dalam psikologi, kode etik menjadi bentuk pengaturan diri (self-regulation) karena profesi memiliki standar perilaku yang sesuai dengan tanggung jawab profesional. Menurut Lindsay (2012), kode etik berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan, pedoman pendidikan, dasar bagi badan regulasi dalam mengambil keputusan, serta petunjuk mengenai perilaku profesional kepada masyarakat.

Sebagai mekanisme pengawasan, kode etik mengarahkan psikolog agar bekerja berdasarkan standar profesional yang mencakup kompetensi, kerahasiaan, hubungan profesional, asesmen, penelitian, serta tanggung jawab terhadap klien dan masyarakat. Menurut Koocher dan Keith-Spiegel (2008), persoalan etika dapat muncul dalam berbagai kegiatan psikologi sehingga profesional harus memahami dan menerapkan standar etika dalam kehidupan nyata.

Kode Etik Psikologi Indonesia juga menjadi dasar untuk menilai perilaku profesional psikolog dan ilmuwan psikologi serta memiliki fungsi disiplin melalui mekanisme penanganan pelanggaran dan pemberian sanksi. Sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga untuk melindungi masyarakat, menjaga martabat profesi, serta memberikan batas yang jelas antara perilaku yang dapat diterima dan yang tidak sesuai dengan standar profesi.

Kode Etik Sebagai Sarana Pengembangan Profesi

Kode Etik Sebagai Sarana Pengembangan Profesi

Kode etik menjadi dasar pengembangan profesi karena memberikan standar perilaku yang harus dipertahankan oleh anggota profesi dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Menurut Lindsay (2012), kode etik juga memiliki fungsi edukatif karena dapat digunakan untuk mendidik mahasiswa psikologi, calon profesional, dan psikolog mengenai nilai serta standar yang diharapkan dalam praktik psikologi. Kode etik juga menjadi standar dalam tindakan profesional sehingga psikolog tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkannya secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme

Pengembangan profesi melalui kode etik dilakukan dengan meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Psikolog perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya sesuai perkembangan ilmu psikologi, teknologi, kebutuhan masyarakat, metode intervensi, dan asesmen, serta menyadari keterbatasan kompetensinya. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan lanjutan, pelatihan, supervisi, konsultasi, dan kegiatan pengembangan profesional yang sesuai dengan prinsip lifelong learning. Kode etik juga mendorong budaya reflektif agar psikolog mampu mengevaluasi tindakan dan keputusan profesionalnya, terutama dalam situasi yang kompleks. Menurut Grace et al. (2020), keputusan etis dipengaruhi oleh faktor profesional dan karakteristik dilema yang dihadapi, sehingga kemampuan refleksi dan pengambilan keputusan menjadi penting. Dengan demikian, kode etik mendukung peningkatan kompetensi, pendidikan etika, pengembangan diri, supervisi, serta pembentukan budaya profesional yang bertanggung jawab.

Kode Etik Sebagai Sarana Pengembangan Profesi

Penerapan kode etik dalam praktik tidak selalu sederhana karena setiap psikolog dapat menghadapi situasi yang berbeda. Menurut Grace et al. (2020), pengambilan keputusan etis dipengaruhi oleh faktor profesional dan karakteristik dilema etis yang dihadapi. Oleh karena itu, penerapan kode etik membutuhkan pertimbangan yang sesuai dengan konteks.

1 Keterbatasan Pemahaman dan Pelatihan Etika

1

Memahami prinsip kode etik belum tentu membuat psikolog mampu menerapkannya dalam situasi nyata yang melibatkan berbagai kepentingan. Karena itu, pendidikan etika perlu mencakup pembahasan kasus, refleksi, supervisi, dan latihan pengambilan keputusan etis.

3 Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi

3

Telepsikologi dan penggunaan teknologi menimbulkan tantangan baru terkait kerahasiaan, persetujuan, kemampuan, keamanan data, dan penyimpanan data klien. Gamble et al. (2015) menunjukkan bahwa teknologi komunikasi memunculkan persoalan etis baru, terutama terkait kerahasiaan, persetujuan, kompetensi, dan keamanan informasi.

4 Perbedaan Budaya dan Konteks Sosial

4

Prinsip etika dapat berhadapan dengan nilai budaya yang berbeda. Pandangan mengenai keluarga, privasi, pengambilan keputusan, peran sosial, dan tanggung jawab dapat memengaruhi cara seseorang memahami masalah etis. Karena itu, psikolog memerlukan pemahaman kontekstual, keterampilan budaya, kemampuan reflektif, dan kemampuan berkonsultasi.

2 Tekanan Institusi dan Konflik Kepentingan

2

Psikolog dapat menghadapi tuntutan dari sekolah, perusahaan, rumah sakit, lembaga pemerintah, atau keluarga klien yang bertentangan dengan kewajiban profesional. Konflik kepentingan juga dapat muncul ketika kepentingan pribadi, organisasi, atau pihak ketiga memengaruhi objektivitas keputusan profesional.

5 Keterbatasan Sumber Daya dan Dukungan Organisasi

5

Keterbatasan fasilitas, supervisi, pelatihan, konsultasi profesional, dan dukungan organisasi dapat menyulitkan penerapan standar praktik yang ideal. Dalam kondisi ini, tanggung jawab etis tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga dengan lingkungan profesional yang mendukung atau menghambat penerapan standar.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kode etik berperan penting dalam membentuk identitas, integritas, dan profesionalisme psikolog serta ilmuwan psikologi. Selain menjadi pedoman perilaku, kode etik juga berfungsi melindungi masyarakat dari praktik tidak etis, mengawasi pelaksanaan profesi, serta mendorong pengembangan kompetensi berkelanjutan. Di tengah tantangan institusi, teknologi, dan budaya, komitmen terhadap prinsip etika menjadi kunci dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi psikologi.

Saran

Mahasiswa psikologi diharapkan membangun kesadaran etis sejak dini melalui diskusi kasus, simulasi dilema etika, dan refleksi. Psikolog serta ilmuwan psikologi perlu konsisten menerapkan kode etik, menjaga independensi, dan mengembangkan kompetensi sesuai perkembangan teknologi serta keberagaman budaya. Sementara itu, HIMPSI diharapkan memperkuat pengawasan, pembinaan, dan penegakan etika melalui pelatihan rutin serta penyusunan panduan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.



TERIMA KASIH

